

**IMPLEMENTASI PROGRAM COMMUNITY BASED FOREST  
MANAGEMENT OLEH ASIAN FOREST COOPERATION  
ORGANIZATION DI BATU TEGI LAMPUNG  
TAHUN 2017-2020**

**Tommy Septanus Christian<sup>1</sup>**

***Abstract:** Indonesian has a problem in carrying out good forest management, this results in forest area that continues to experience deforestation or loss of forests due to the many land clearing illegally. This problem must be solved in various ways, one of which is working with the community to safeguard the forest of illegal land clearing. This effort is known as the Community Based Forest Management, but Indonesia's efforts were unsuccessful. So Indonesia cooperates with the Asian Forest Cooperation Organizations to improve forest management in Indonesia through the program "Facilitating The Participatory Planning of Community Based Forest Management Using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and Thailand" which is a program regarding forest guarding with the help of the community through increasing community welfare with non-timber forest products. The program was then carried out in Lampung Province with the unity of the Tegi Stone Forest Management Unit and which implemented the program was the Cempaka Farmer Group.*

***Keywords:** Program Implementation, Asian Forest Cooperation Organization, Batu Tegi Lampung.*

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan sebesar 123 hektare pada tahun 2020, namun luas hutan tersebut telah mengalami deforestasi sebesar 10 juta hektare dari tahun 2001 – 2020 (bbc.com, 2020). Hal ini membuat pemerintah Indonesia harus melakukan upaya dalam menangani permasalahan hutan di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah *community based forest management* (CBFM) pada tahun 1998 yang merupakan tahun dimana penebangan pohon ilegal banyak dilakukan demi pembukaan lahan untuk perusahaan maupun tempat tinggal yaitu sebesar 3.5 juta hektare (databoks.katadata.co.id, 2019).

Program CBFM merupakan program pembangunan yang memusatkan pembangunannya pada kesejahteraan masyarakat lokal untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, melestarikan sumber daya hutan, dan memastikan pelestarian hutan adat, selain itu program ini juga dapat menjadi kontrol ketat atas pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat yang harus memenuhi harapan untuk hak dan pemanfaatan yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: christiantommy23@gmail.com

lebih besar oleh masyarakat lokal (termasuk masyarakat adat dan transmigran) (Nursalam, 2010).

Namun upaya ini tidak berdampak besar terhadap deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia, hal ini yang membuat pemerintah Indonesia melakukan persetujuan terhadap pembentukan *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) yang di inisiasi oleh Korea Selatan. Pembentukan AFoCO bertujuan untuk memperkuat kerjasama kehutanan dengan mentransformasikan teknologi dan kebijakan yang telah terbukti menjadi tindakan nyata dalam konteks pengelolaan hutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam persetujuan itu juga pemerintah Indonesia menyetujui setiap program atau proyek lingkungan yang dibuat oleh AFoCO dapat dilakukan di Indonesia, penandatanganan persetujuan ini dilakukan oleh Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar, M.Sc di Soul, Korea dan disaksikan oleh Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Korea, Park Chull-joo (afocosec.org, 2016).

Dalam kerjasama tersebut pemerintah Indonesia menyetujui untuk menjalankan program yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan, pelestarian hutan, perbaikan hutan melalui organisasi antar pemerintah di bidang kehutanan yang berorientasi aksi dan memfokuskan pada *community development*, pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, peningkatan kapasitas dan kemitraan antara AFoCO dengan wilayah-wilayah di Indonesia (sitinurbaya.com, 2016)

Salah satu program yang dijalankan oleh AFoCO di Indonesia adalah program “*Facilitating the Participatory Planning of Community-Based Forest Management Using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies in Forest Resources Management in The Philippines, Indonesia and Thailand*” yang merupakan proyek ke-tiga dari AFoCO dan dilakukan di 3 negara Asia yaitu Thailand, Filipina dan Indonesia. Proyek tersebut merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*) menggunakan teknologi *Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS)* dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan program ini juga mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (sdgs.bappenas.go.id, 2016).

Program dari AFoCO ini kemudian dilakukan di wilayah Indonesia yaitu di hutan Desa Paru di Sijunjung, Sumatera Barat; Kemitraan Kehutanan Cempaka di Pringsewu, Lampung; dan hutan kemasyarakatan Tuartana di Sikka, Nusa Tenggara Timur yang dijadikan sebagai *pilot site* dari program tersebut (afocosec.org, 2017).

Implementasi program yang dijalankan di 3 *pilot site* tersebut adalah peningkatan sistem pemetaan lahan tutupan hutan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah melalui teknologi *Geographic Information System (GIS)* atau juga dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan sekumpulan komponen yang terdiri dari perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data geografi, dan personil yang dirancang untuk secara efisien merekam, menyimpan, memperbaharui,

menganalisis dan menyajikan semua data geografis dalam bentuk informasi yang bereferensi geografis (peta), alat yang digunakan dalam program ini adalah *Global Positioning System* (GPS) (Dwi Prabowo, Anang Tri Nugroho, John Palapa & Hilmi Ardiansyah, 2017). Implementasi ini kemudian diawali dengan pemilihan kelompok masyarakat yang mampu menjalankan kerjasama tersebut dan dapat menerapkannya dengan baik.

Dari ketiga wilayah yang menjadi *pilot site*, wilayah Kemitraan Kehutanan Cempaka di Pringsewu, Lampung menjadi objek penelitian dari penulis, hal ini dikarenakan pemerintah provinsi Lampung mengakui ketidakmampuannya dalam mengawasi wilayah hutan tanpa bantuan dari masyarakat (Mursalin Yasland. Muhammad Hafil. 2020). Selain itu Menurut asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemrov Lampung, Adeham, menyebutkan bahwa di Lampung telah mengalami deforestasi sebesar 50% dari luas wilayah hutan tersebut atau hanya tersisa seluas 502.363 ha, dari luas wilayah hutan sebesar 1.004.735 ha, hal ini disebabkan oleh penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, tambang ilegal dan pembangunan tambak oleh perusahaan (Mursalin Yasland, Yudha Manggala P Putra (ed). 2015).

Wilayah Lampung yang menjadi tempat implementasi program AFoCO adalah KPH Batutegei yang memiliki luas 58.162 ha yang terbagi atas blok inti yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan seluas 10.827 hektar dan Blok Pemanfaatan Hutan Lindung, difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi hutan lindung, seluas 47.334,46 hektar, yang terdiri dari areal berijin 11.103,65 hektar dan wilayah tertentu seluas 36.230,81 hektar (KPH Batu Tegi. 2013). KPH Batu Tegi merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan hutan berbasis masyarakat. Terutama potensi pertanian di wilayah KPH Batu Tegi, Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di KPH ini adalah petani kopi dan coklat. Terlebih lagi masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan KPH sangatlah dibutuhkan (Sylviani dan Elvida Yosefi Suryandari. 2013).

Pada tahun 2017 Kemitraan Kehutanan KPH Batutegei, *Asian Forest Cooperation Organization* (AFoCO) di bawah Pusat Litbang Hutan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan jangka waktu hingga tahun 2020 melalui beragam fasilitas mulai dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penggunaan teknologi GIS melalui GPS, pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) hingga penyediaan peralatan pendukungnya (Admin lampungprov. 2018). Hutan yang berada di wilayah kelompok tani cempaka dikelola oleh 165 orang anggota kelompok dan memiliki rencana kerja umum jangka waktu sepuluh tahun yang akan diarahkan pada pengolahan HHBK (KPH Batu Tegi. 2013). Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Lampung, Wahyudi mengatakan, perencanaan partisipatif dengan teknologi

*Geographic Information System* (GIS) di implementasikan melalui penggunaan teknologi GIS untuk mendukung sistem kehutanan yang lebih baik, sehingga konflik tata batas dapat diminimalisir dan permasalahan hutan dapat terselesaikan dengan baik dengan bukti yang lebih kuat.

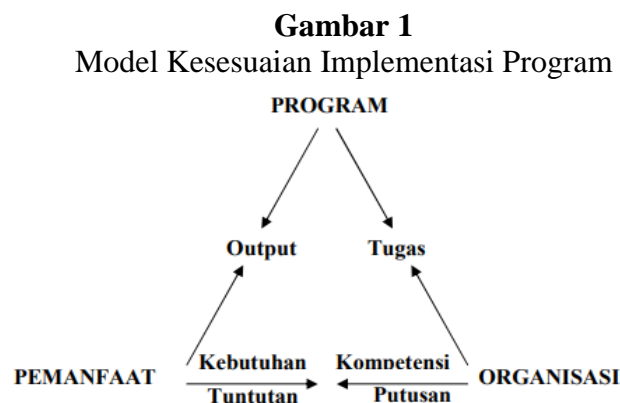
Penjagaan dan Pemanfaatan hutan yang berada di KPH Batutege Provinsi Lampung harusnya dapat ditingkatkan dengan baik. Namun kenyataannya hutan di KPH Batutege tidak terjaga dengan baik dan masyarakat belum dapat memaksimalkan sumber daya hutan di KPH Batutege, sehingga pemerintah Indonesia dan Provinsi Lampung memilih KPH Batutege untuk menjalankan program GIS melalui CBFM yang dilakukan oleh AFoCO

### Kerangka Teori Konsep

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan atau upaya untuk mencapai suatu tujuan sebagai asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Dalam menjalankan suatu program menurut Charles O. Jones memiliki tiga pilar dalam menjalankannya yaitu:

1. Pengorganisasian  
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi  
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi  
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Halaman 12. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

Model Kesesuaian Implementasi Program Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan skunder yang kemudian dijawab menggunakan konsep Implementasi Program dari Charles O. Jones dan David C. Korten. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur melalui penelitian sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

### **Hasil Penelitian**

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Lampung dan AFoCO dalam perbaikan hutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada didekat hutan dengan menggunakan teknologi merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat menjaga hutan yang berada disekitar mereka agar tidak terjadi deforestasi. Hal ini dilakukan karena hutan di Lampung telah mengalami deforestasi hingga 50%, sehingga diperlukan penjagaan hutan agar deforestasi tidak terjadi kembali. Dalam implementasi ini para petani juga diajarkan menggunakan teknologi GPS yang dapat digunakan untuk mengetahui luas wilayah serta dapat memetakan wilayah yang dimiliki oleh para petani dan wilayah yang merupakan hutan. Pemerintah Lampung dalam menjalankan program dari AFoCO ini menunjuk KPH Batu Tegi untuk memilih kelompok tani yang membutuhkan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan, kelompok tani yang dipilih kemudian adalah kelompok tani cempaka yang memiliki wilayah terluas dan berdekatan dengan hutan lindung.

Kelompok tani cempaka merupakan kelompok tani yang dibentuk untuk melakukan penjagaan hutan dan kelompok tani ini juga dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjual hasil tani mereka. Kelompok tani cempaka yang terpilih untuk melakukan implementasi ini memiliki berbagai masalah dalam melakukan pertanian karena wilayah mereka yang terlalu berdekatan dengan wilayah hutan lindung yaitu hutan lindung Way Waya. Selain itu kelompok tani tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan pemanfaatan hutan tanpa harus melakukan pembukaan lahan melalui penebangan pohon dan perusakan lingkungan. Hal ini lah yang

membuat KPH Batu Tegi yang merupakan kesatuan pengelolaan hutan yang bertugas untuk menjaga hutan dan membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan memilih kelompok tani cempaka untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut diwilayah mereka.

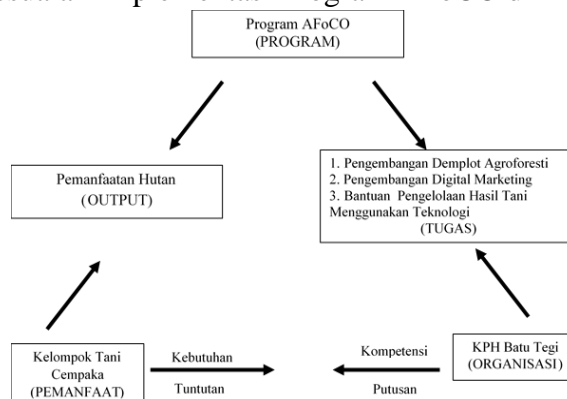
**Penggunaan *Global Positioning System* (GPS) di Batu Tegi**

Dalam implementasi program yang dilakukan oleh AFoCO di KPH Batu Tegi, Lampung menunjukan hasil yang sangat baik dan positif bagi perkembangan indeks pembangunan manusia yang juga berimbas kepada kesejahteraan masyarakat yang berada di KPH Batu Tegi. Bahkan dalam wawancara, ibu Dona mengatakan bahwa AFoCO telah melakukan survei mengenai dampak implementasi program kepada kolompok tani cempaka, dan dari hasil penilaian dampak kegiatan yang dilakukan kepada setiap responden dari kelompok tani hingga masyarakat menyatakan bahwa terdapat perbedaan setelah adanya pendampingan AFoCO dalam melakukan kegiatan usaha tani, baik dalam pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pola tanam yang menjadi lebih baik. Anggota kelompok tani juga menyatakan bahwa permasalahan mengenai tata batas lahan garapan dimasing-masing wilayah kelompok tani menjadi lebih jelas berkat adanya penggunaan teknologi GIS melalui GPS, hal ini membuat tidak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan garapan (Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020).

Dalam implementasi program kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani cempaka yang ada di provnisi Lampung dengan AFoCO menurut teori kerjasama internasional merupakan kerjasama yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan serta dapat mensejahterakan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Hal ini dilakukan agar hutan tidak rusak dan juga dapat menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

Dalam konsep implementasi program terdapat model kesesuaian untuk menjalankan atau mengimplementasikan sebuah program, model kesesuaian implementasi program ini ditunjukan oleh David C. Korten yang berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Implementasi program AFoCO di KPH Batu Tegi menunjukan pola sebagai berikut:

**Bagan 1**  
Model Kesesuaian Implementasi Program AFoCO di KPH Batu Tegi



Sumber: Diolah

Dalam bagan tersebut menunjukkan bahwa program AFoCO di implementasikan berdasarkan tugas dengan output berupa pemanfaatan hutan, dengan organisasi yang menjalankan adalah KPH Batu Tegi dan memutuskan berdasarkan kompetensinya kelompok tani cempaka berhak menjalankan program tersebut di wilayah mereka dengan melihat kebutuhan serta tuntutan (masalah) yang terjadi di wilayah tersebut.

Pada bagan juga menjelaskan bahwa AFoCO yang memiliki program memiliki output berupa pemanfaatan hutan dengan tugas yaitu pengembangan demplot agroforesti, pengembangan digital marketing, dan bantuan pengelolaan hasil tani menggunakan teknologi. Untuk dapat menjalankan tugas serta output tersebut AFoCO membutuhkan organisasi KPH Batu Tegi yang dapat menunjukkan pemanfaat berdasarkan kompetensi dan keputusan dari organisasi yaitu kelompok tani cempaka yang memiliki kebutuhan serta tuntutan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa dan informasi mengenai pemanfaatan hutan tanpa merusak hutan.

Program AFoCO berhasil dilaksanakan di wilayah tersebut karena memenuhi kriteria kesesuaian yang dibutuhkan dalam implementasi program yaitu, Pertama, memiliki kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani cempaka sebagai pemanfaat. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu KPH Batu Tegi. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program. Setelah tercapainya kesesuaian tersebut maka implementasi program AFoCO dapat melewati 3 pilar atau tahapan yaitu:

Pengorganisasian, merupakan penunjukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Sehingga dalam pilar ini atau tahapan ini implementasi program yang dilakukan adalah penunjukan kelompok tani cempaka oleh KPH Batu Tegi dalam menjalankan atau mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan program tersebut, hal ini dilakukan agar program tersebut dalam berjalan dengan baik karena memiliki SDM yang berkualitas.

Interpretasi, yang dilaksanakan melalui pelatihan sebelum dijalankannya program kerjasama tersebut sehingga kelompok tani cempaka yang melaksanakan program tersebut dapat menjalankannya sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Penunjukan kelompok tani cempaka sebagai organisasi yang melakukan atau yang mengimplementasikan program dari AFoCO.

Sebelum dijalankannya program GIS diperlukan pelatihan penggunaan GIS untuk pemetaan areal hutan bagi staf KPH Batu Tegi, dan dinas kehutanan provinsi Lampung, yang akan menjadi pendamping bagi kelompok tani Cempaka. Penerapan pelatihan ini juga dilakukan bersama fasilitator dari AFoCO yang melihat setiap kinerja dari setiap bagian dari KPH, Dinas dan Kelompok Tani, dalam penerapan ini kelompok tani yang terlibat sebanyak 30-35 orang yang diberikan pelatihan dengan materi konsep dasar penggunaan GIS yang lebih sederhana yaitu GPS mengenai pengukuran area, prosedur kerja GPS dan sistem koordinat, serta penggunaan kompas, pemberian materi pemetaan, teknik pengukuran jarak, arah dan kemiringan.

Setiap anggota kelompok tani juga melakukan praktik lapangan penggunaan GPS yang meliputi pengambilan titik batas antara setiap blok di area hutan, melakukan pengambilan titik koordinat sepanjang batas luar hutan, melakukan survei potensi yang

ada di kawasan hutan dengan mengambil koordinat yang memiliki potensi hasil hutan seperti pohon dan tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut seperti membuat rotan, obat dan pakan (Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020). Berikut praktik lapangan yang dilakukan kelompok tani cempaka:

### Gambar 2

#### Praktik Lapangan Penggunaan GPS

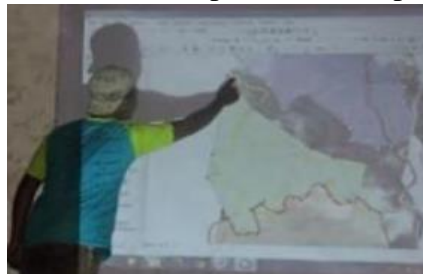


Sumber: Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020. Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Halaman 16

Pada gambar diatas menunjukkan kelompok tani yang sedang melakukan pemetaan titik koordinat menggunakan GPS bersama pihak KPH Batu Tegi dan juga fasilitator. Selain itu setiap anggota kelompok tani diajari cara untuk melakukan upload hasil pengukuran dari GPS ke laptop dan mempresentasikan hasil dari praktik lapangan yang dilakukan dan juga belajar untuk membuat peta dikerta milimeter berdasarkan titik hasil pengukuran menggunakan GPS. Berikut presentasi yang dilakukan:

### Gambar 3

#### Presentasi Kelompok Tani Cempaka



Sumber: Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020. Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Halaman 16

Pada gambar diatas menunjukkan salah satu ketua pada kelompok tani munjukan titik koordinat batas hutan dan juga titik koordinat dari setiap lahan hutan yang masuk dalam kelompok tani cempaka.

Penerapan atau Aplikasi, yang dijalankan oleh kelompok tani cempaka telah sesuai dengan tujuan program tersebut, bahkan dalam penerapannya setiap anggota kelompok menunjukkan tingkap partisipasi yang kuat. Yaitu pembangunan demplot Agroforesti, pengembangan digital marketing, dan bantuan pengelolaan hasil tani menggunakan teknologi.

### Pembangunan Demplot Agroforesti

Dalam kerjasama ini yang utama dilakukan adalah penanaman seluas 10 ha di areal Kemitraan kehutanan Cempaka KPHL Batutegi Resort Way Waya Register 22 desa



Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Berdasarkan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) atau musyawarah bersama kelompok tani Cempaka, menyepakati jenis tanaman yang ditanami adalah pala (*Myristica fragrans*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), cempaka (*Michelia champaca*), kemiri (*Aleurites moluccana*), damar (*Shorea javanica*), manggis (*Garcinia mangostana*), maja (*Crescentia cujete*), Gliricide (*Gliricidia sepium*) dan pisang (*Musa Sp*) dengan tanaman semusim jahe (*Zingiber officinale*), temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*), Sereh (*Cymbopogon nardus*) dan lada perdu (*Piper albi*). Kegiatan penanaman dilakukan menggunakan pola partisipasi dan insentif (Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020).

Dengan tujuan penanamannya adalah meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam mengelola hutan, meningkatkan produktivitas hutan, serta sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, kegiatan penanaman ini tidak hanya berupa penambahan jumlah luas tutupan lahan, namun juga untuk meningkatkan modal sosial kelompok tani sehingga tercapai kemandirian kelompok sebagai faktor pendukung dalam penanaman dan usaha perhutanan sosial selanjutnya. Tujuan kegiatan pembangunan demplot agroforestri adalah untuk menambah jumlah tanaman kehutanan dan tanaman penghasil dari Hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai upaya meningkatkan tutupan lahan di areal Kemitraan Kehutanan Cempaka KPHL Batutegi, Pringsewu, Lampung. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanaman untuk menjamin kelestarian pemanfaatan hasil hutan non kayu, penanaman ini dilakukan pada tanggal 15 – 20 Januari 2018 (Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020).

Dalam kerjasama penanaman ini AFoCO membantu menyediakan bibit, pupuk, ajir, herbisida, pestisida dan tanaman pelindung. Sedangkan kelompok tani berperan dalam kegiatan penanaman dengan menanam dan memelihara tanaman hasil penanaman. Partisipasi kelompok tani Cempaka pada saat evaluasi bulan Februari 2019 cukup meningkat. Hal ini dicirikan dengan kondisi demplot penanaman yang baik. Demplot penanaman terlihat lebih terawat. Bila terdapat tanaman yang mati, petani segera melakukan penyulaman dengan bibit yang dibeli secara pribadi. Anggota kelompok tani Kemitraan Kehutanan Cempaka di KPHL Batutegi, Pringsewu umumnya sudah mengetahui dan mampu melakukan teknik penanaman dengan model agroforestri, pemetaan posisi tanaman dengan GPS, pemeliharaan dan evaluasi pertumbuhan tanaman. Berikut ini tanaman yang di tanam oleh kelompok tani Cempaka:

#### Gambar 4

Tanaman yang di Tanam Oleh Kelompok Tani Cempaka



Sumber: Danu dan Dona Octavia. 2020. Pembangunan Demplot Agroforestri Di Kphl Batutegi Lampung (Establishment of Agroforestry Plotsat Cempaka Forestry Partnership in Batutegi Forest Management Unit, Lampung Province). Vol. 3. No. 1

Pada gambar diatas menunjukkan kelompok tani yang sedang melakukan pengukuran tinggi terhadap tanaman yang ditanam melalui kerjasama dengan AFoCO.

Jumlah kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 6 kelompok yaitu I. Cempaka putih (Ketua: Pak Dimas), II. Cempaka Kuning (Ketua: Sunarya), III. Cempaka Asih (Ketua: Pak Arif), IV. Cempaka Agung (Ketua: pak Sudarmawan), V. Galih Cempaka (Pak Imron), VI. Cempaka Madu (Ketua: Pak Arif) Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020).

Kelembagaan kelompok tani Cempaka dinilai sudah mulai kuat setelah dilakukannya kerjasama, semua kegiatan dilakukan oleh kelompok tani yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan dikoordinir oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Pak Dimas). Pendamping dan bimbingan teknis di lapangan dilakukan oleh Koordinator lapangan dari KPHL Batutegei. Untuk menjaga dan menguatkan kelembagaan kelompok tani, dilakukan pertemuan-pertemuan rutin antara anggota kelompok tani, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, dan kordinator lapangan. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi antar kelompok tani sehingga kegiatan agroforestri dapat berjalan dengan baik.

Seluruh rencana program, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dilaporkan dalam berita acara dan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kelompok tani.

### **Pengembangan Digital Marketing**

Kelompok Kemitraan Cempaka, di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegei Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung mendapatkan pelatihan pengembangan dan pemasaran produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), di Bandarlampung pada tanggal 16 April 2019 (megapolitan.antaranews.com, 2019).

Workshop atau pelatihan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok kemitraan cempaka, khususnya dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil hutan, sehingga dapat meningkatkan harga jual produk, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penghasilan. Pada pelatihan tersebut setiap peserta yang hadir diberikan pelatihan berupa materi Pengemasan Produk dan Branding oleh GO UKM, dan Keamanan Pangan dan Sertifikasi IPRT oleh Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung (megapolitan.antaranews.com, 2019).

Menurut Kirsfianti L. Ginoga yang merupakan Kapuslitbang Hutan pelatihan ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan livelihood berbasis hijau, yang berarti ramah lingkungan, yang dapat memberi nilai tambah kepada sumberdaya alam, melibatkan inovasi, serta menerapkan prinsip green product. Berikut ini foto setelah dilakukannya pelatihan:

**Gambar 5**  
Foto Bersama Setelah Pelatihan



Sumber: <https://megapolitan.antaranews.com/berita/58316/pelatihan-pengembangan-dan-pemasaran-produk-hasil-hutan-bukan-kayu-di-lampung>

Pada gambar diatas menunjukkan antusiasme dari kelompok tani terhadap pelatihan yang dilakukan, pelatihan ini sangat penting bagi pengembangan penjualan hasil tanaman non kayu dari kerjasama yang dijalankan dengan AFoCO.

Pengajaran yang diberikan oleh AFoCO adalah dengan menjual hasil tani melalui sosial media, berikut ini hasil dari pelatihan yang diberikan oleh AFoCO:

**Gambar 6**  
Website Penjualan Hasil Tani Kelompok Tani Cempaka



Sumber: <https://tanicempaka.or.id/>

Pada gambar menunjukkan website dari kelompok tani cempaka yang didalamnya berisikan mengenai berbagai macam produk hasil tani termasuk pala bubuk yang merupakan hasil dari tumbuhan pala yang ditanam oleh petani melalui bantuan dari AFoCO. Berikut ini foto pala bubuk yang dijual dalam website tersebut:

**Gambar 7**  
Hasil Tani Berupa Pala Bubuk



Sumber: <https://tanicempaka.or.id/>

Pada gambar diatas menunjukkan pala bubuk yang dihasilkan dari pertanian pala di Batu Tegi yang merupakan hasil hutan non kayu yang mulai dihasilkan oleh kelompok tani cempaka. Hal ini jelas membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

### **Bantuan Pengelolaan Hasil Tani Menggunakan Teknologi**

Pengembangan mata pencaharian diisi dengan Alih Teknologi “Pengolahan Produk HHBK dan Penggunaan Mesin Pengolahannya untuk Mendukung Agribisnis Berbasis Hutan”. Peserta yang hadir berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, KPHL Batutegi dan Gapoktan Kemitraan Kehutanan Cempaka. Acara berlangsung selama 2 hari, 6-7 Maret 2020 di Bandar Lampung ([puslitbanghut.or.id](http://puslitbanghut.or.id), 2020).

Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran Pusat Litbang Litbang Hutan Kristina Yuniarti, S.Hut., mewakili Kepala Pusat Litbang Hutan menyampaikan bahwa keberlanjutan penerapan ilmu dari pelatihan sangat penting. Diharapkan para peserta yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang telah difasilitasi oleh AFoCO dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kapasitas dan pendapatan anggota gapoktan dapat berbagi ilmu dengan anggota lain yang belum berkesempatan mendapatkan fasilitasi serupa ([puslitbanghut.or.id](http://puslitbanghut.or.id), 2020).

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ali Sodikin mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi terhadap fasilitasi yang telah diberikan untuk peningkatan kapasitas kelompok Gapoktan Kemitraan Kehutanan Cempaka di bawah binaan KPHL Batutegi khususnya dan wilayah provinsi Lampung umumnya. Kepala KPHL Batutegi Yayan Ruchyansyah menyampaikan bahwa potensi sumber daya alam yang ada hendaknya dapat dikelola secara optimal dengan memanfaatkan modal usaha berupa skill dan peralatan yang telah difasilitasi secara maksimal ([puslitbanghut.or.id](http://puslitbanghut.or.id), 2020).

Pengembangan Mata pencaharian melalui Alih Teknologi Pengolahan Produk HHBK dan Penggunaan Mesin Pengolahannya untuk Mendukung Agribisnis Berbasis Hutan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui pengentasan kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan serta

perbaikan nutrisi. Sejalan dengan konteks global dan prioritas nasional (puslitbanghut.or.id, 2020).

Koordinator AFoCO Regional Project Component 3 Dona Octavia menyampaikan progres kegiatan di site Kemitraan Kehutanan Cempaka-KPHL Batutegi, terutama pada penggunaan GIS dalam pengelolaan hutan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini selaras dengan arahan Bapak Presiden RI, bahwa peningkatan kemampuan teknis dalam memproduksi komoditas unggul, fasilitasi modal usaha, akses teknologi tepat guna, penyediaan pasar, stabilisasi harga komoditas dan lain-lain merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk meningkatkan perekonomian (puslitbanghut.or.id, 2020).

Dalam bantuan tersebut AFoCO Regional Project Component 3 melalui Pusat Litbang Hutan menyerahkan 1 (satu) set alat produksi dalam pengolahan produk hasil hutan bukan kayu yaitu tanaman agroforestri kopi melalui KPHL Batutegi kepada anggota Kemitraan Kehutanan Cempaka berupa 1 unit mesin penyangrai (roaster) kapasitas 5 kg, 2 unit mesin pembubuk/penggiling (grinder) dan 1 unit alat press kemasan (sealer). Pada kesempatan ini, materi pengenalan alat dan pemahaman proses dalam pengolahan produk HHBK kopi, seleksi biji, penggunaan alat-alat pengolahan kopi yang terdiri dari praktek menyangrai (roasting), menggiling (grinding), pengujian cita rasa kopi (cupping) dan hitungan bisnis (puslitbanghut.or.id, 2020). Berikut ini salah satu produk kopi yang dihasilkan oleh petani kopi dengan menggunakan bantuan teknologi tersebut:

### **Gambar 8**

Produk Kopi Dari Petani KPH Batu Tegi



Sumber: <https://m.facebook.com/pages/category/Patio-Garden/Kopi-Batu-Tegi-192296820807976/>

Pada gambar diatas menunjukkan produk kopi yang dihasilkan dari menggunakan teknologi yang diberikan oleh AFoCO yang kemudian dapat diperjual belikan melalui website dan sosial media setiap petani yang tergabung dalam kelompok tani cempaka. Selain itu AFoCo juga memberikan insentif berupa kambing oleh AFoCO untuk meningkatkan semangat kelompok tani Cempaka, dari 12 ekor kambing indukan yang diberikan sudah melahirkan 9 ekor. Anggota kelompok tani yang mendapatkan insentif ini, berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama 2 tahun dan juga berkewajiban menyerahkan 3 ekor anak kambing siap beranak di tahun kedua dan 1 ekor di tahun ketiga kepada anggota kelompok tani cempaka lainnya. Hal ini dilakukan sebagai modal bagi anggota kelompok tani yang lainnya.



### Gambar 9

Foto Kambing yang diberikan Pertama Kali



Sumber: Danu dan Dona Octavia. 2020. Pembangunan Demplot Agroforestri Di Kphl Batutege Lampung (Establishment of Agroforestry Plotsat Cempaka Forestry Partnership in Batutege Forest Management Unit, Lampung Province). Vol. 3. No. 1

Pada gambar diatas menunjukkan kambing yang diberikan oleh pihak AFoCO dan juga kandang yang dibuat oleh masyarakat dari kelompok tani Cempaka.

Pemberian kambing ini kemudian memberikan dampak yang baik kepada setiap petani yang tergabung dalam kelompok tani cempaka, hal ini disampaikan oleh ibu Dona dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa jumlah kambing di kelompok tani tersebut sudah lebih dari 50 ekor pada tahun 2019 dan juga membantu kesejahteraan setiap petani.

Sehingga dalam program Regional Project Component 3 yang berjudul “*Facilitating the Participatory Planning of Community-Based Forest Management Using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) Technologies in Forest Resources Management in The Philippines, Indonesia and Thailand*”, telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta maksud dari program tersebut untuk membantu petani dan mengembangkan kemampuan petani dalam pengetahuan penggunaan teknologi GIS melalui GPS.

### Kesimpulan

Hasil dari implementasi program yang dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Tegi Provinsi Lampung oleh AFoCO menunjukkan bahwa kelompok tani hingga masyarakat merasakan perkembangan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, dari pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pola tanam yang menjadi lebih baik. Bahkan permasalahan mengenai tata batas lahan garapan disetiap wilayah kelompok tani menjadi lebih jelas berkat adanya penggunaan teknologi GIS melalui GPS, hal ini membuat tidak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan garapan.

### Daftar Pustaka

- A glimpse of the perceived impacts of Community-based Forest Management (CBFM) in Indonesia <https://afocosec.org/newsroom/news/feature-a-glimpse-of-the-perceived-impacts-of-community-based-forest-management-cbfm-in-indonesia/> (diakses pada tanggal 17 April 2022)
- About AFoCo <http://afocosec.org/the-agreement/> (diakses pada tanggal 07 Januari 2021)

- Admin lampungprov. 2018. Pembahasan Progres Program AFOCO di Hutan Kemitraan Cempaka <https://lampungprov.go.id/detail-post/pembahasan-progres-program-afoco-di-hutan-kemitraan-cempaka> (diakses pada tanggal 07 Januari 2021)
- Alih Teknologi Pengolahan Produk HhbK Untuk Mendukung Agribisnis Berbasis Hutan. <http://puslitbanghut.or.id/index.php/berita/2020/03/09/Alih-Teknologi-Pengolahan-Produk-HHBK-untuk-Mendukung-Agribisnis-Berbasis-Hutan>
- BPS <https://www.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 17 April 2022)
- Danu dan Dona Octavia. 2020. Pembangunan Demplot Agroforestri Di Kphl Batutegi Lampung (Establishment of Agroforestry Plotsat Cempaka Forestry Partnership in Batutegi Forest Management Unit, Lampung Province). Ibid halaman 46
- Dona Octavia, Irma Yeny, Kirsfianti L. Ginoga. 2020. Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Halaman 16.
- Dwi Prabowo, Anang Tri Nugroho, John Palapa & Hilmi Ardiansyah. 2017. Modul Pengenalan GIS, GPS & Remote Sensing. Terdapat dalam situs <https://docplayer.info/51319931-Pengenalan-gis-gps-remote-sensing.html> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2021)
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Halaman 12. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> (22 Juli 2021)
- Indonesia termasuk negara pembabat hutan terbanyak, Menteri LHK: 'Pembangunan era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama deforestasi' <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59151007>
- Inilah Deforestasi di Indonesia Periode 1990-2017 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>
- KPH Batu Tegi. 2013. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang [http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP\\_BATU\\_TEGI.pdf](http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_BATU_TEGI.pdf). (diakses pada tanggal 07 Januari 2021)
- Mursalin Yasland. Muhammad Hafil. 2020. Dinas Kehutanan Kosong, Pengawasan Hutan Semakin Lemah <https://www.republika.co.id/berita/daerah/sumatra/20/01/24/q4m98x430-dinas-kehutanan-kosong-pengawasan-hutan-semakin-lemah> (diakses pada tanggal 20 Juli 2021)
- Nursalam. 2010. Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan. Nomor 10 Vol 1. Terdapat dalam situs <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1660/1120>. (diakses pada tanggal 07 Januari 2021)
- Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Produk Hasil Hutan Bukan Kayu Di Lampung <https://megapolitan.antaranews.com/berita/58316/pelatihan-pengembangan-dan-pemasaran-produk-hasil-hutan-bukan-kayu-di-lampung>

- Sylviani dan Elvida Yosefi Suryandari. 2013. Kajian Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Dalam Pengorganisasian Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. <https://media.neliti.com/media/publications/29232-ID-kajian-implementasi-norma-standar-prosedur-dan-kriteria-dalam-pengorganisasian-k.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juli 2021)
- Tegaskan Komitmen Kerjasama Kehutanan di Tingkat ASIA, Indonesia Tandatangani Perjanjian AFoCO <https://sitinurbaya.com/kegiatan-menteri-lhk/585-tegaskan-komitmen-kerjasama-kehutanan-di-tingkat-asia-indonesia-tandatangani-perjanjian-afoco>